

## Kelompok, gerombolan dan kekerasan bersenjata di Timor-Leste

Pada tanggal 11 Februari 2008 Mayor Alfredo Reinado dan sekelompok mantan serdadu F-FDTL<sup>1</sup> yang disebut para pemohon petisi, yang ditemani oleh beberapa mantan anggota PNTL<sup>2</sup> yang bersekutu dengannya, menyerang kediaman Presiden Jose Ramos Horta di Dili. Presiden baru pulang dari latihan berlari dan ditembak dan mengalami luka berat; para petugas keamanan membunuh Reinado dan salah satu anggotanya. Tidak sampai dua jam kemudian, konvoi Perdana Menteri Xanana Gusmão ditembak oleh kelompok di bawah kendali pemimpin para pemohon petisi Letnan Gastão Salsinha.

Kejutan yang ditimbulkan oleh serangan-serangan yang terkoordinasi ini untuk sementara menghentikan kekerasan gerombolan yang mengganggu Timor Leste selama Desember 2007. Reinado dikenal sebagai tokoh utama dalam jaringan luas gerombolan, kelompok barisan politik, dan kelompok pendukung dalam para elit politik. Walaupun para pemohon petisi mengganggu stabilitas dalam politik dan masyarakat Timor Leste selama dua tahun, ancaman tersebut tidak diantisipasi dengan baik.

Kelompok dan gerombolan bersenjata bukan fenomena baru di Timor-Leste, tetapi berevolusi dari kelompok pemberontakan klandestin selama periode penjajahan Indonesia dan menjadi beraneka ragam perkumpulan, termasuk para veteran yang termarjinalisir, kelompok klandestin, barisan politik, kelompok bela diri, gerombolan berbasis di desa, kelompok pemuda dan organisasi keamanan. Sembilan tahun setelah berakhirnya pendudukan Indonesia, kenyataan bahwa jumlah gerombolan telah meningkat dan menjadi lebih beraneka ragam mencerminkan serangkaian tekanan sosial di masyarakat Timor Leste dan bahwa negara dan lembaga-lembaganya tetap lemah. Selama pendudukan kelompok-kelompok tersebut melindungi komunitasnya dari aparat keamanan Indonesia dan kaki tangannya; sekarang mereka melindungi komunitasnya dari komunitas lain.

Laporan Singkat ini meninjau keberadaan dan peranan gerombolan di Timor Leste. Dengan demikian, laporan singkat ini meneliti pertumbuhannya baru-baru ini, ancaman yang

ditimbulkan olehnya, serta penggunaan dan aksesnya pada senjata, pada khususnya senjata api kecil. Laporan ini menemukan bahwa:

- Walaupun kelompok bersenjata di Timor Leste dimotivasi dan dipengaruhi oleh berbagai macam keanggotaan, komando dan penguasaan, kelompok tersebut seringkali disusun menurut jaringan pendukung dan kekeluargaan yang terpusat pada tokoh tunggal, dan kesetiiaannya dipertahankan melalui penyediaan pelayanan pada skala kecil.
- Kelompok bela diri meningkatkan pengaruh dan jangkauannya secara signifikan selama beberapa tahun terakhir ini; sekarang ada 20,000 anggota terdaftar – dan mungkin juga ada anggota dalam jumlah yang sama yang tidak terdaftar – yang berpengaruh di 13 distrik. Dili menjadi medan tempur utama bagi kelompok bela diri, dan mereka sering berkelahi di depan umum.
- Ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi kemungkinan bahwa kelompok akan melakukan kekerasan, yang termasuk konflik lama dan pembunuhan dendam antara kelompok etnis yang berakar pada beberapa dasawarsa yang lalu, sengketa hak milik, pengangguran sistematis, ketidakpuasan politik, persaingan atas daerah kekuasaan, kejahatan merampas, dan bela diri.
- Senjata api kecil dan senjata ringan buatan pabrik rupanya tidak menjalankan peranan besar dalam memperparah kekerasan gerombolan di Timor Leste. Kebanyakan kekerasan dilakukan dengan senjata teknologi rendah, yang termasuk batu, anak panah, bahan ledakan tidak canggih, dan busur buatan sendiri yang dapat meluncurkan anak panah dan rakitan, walaupun pistol dan senapan serbu juga digunakan.
- Jawaban negara terhadap gerombolan tersebut termasuk razia yang dipimpin oleh aparat keamanan dan 'proses perdamaian' yang dimediasi oleh Kantor Perdana Menteri atau masyarakat sipil. Intervensi lain juga dapat memberi hasil yang memuaskan, seperti pembentukan komite pengaruh antar-lembaga tentang kebijakan remaja dan mediasi, mengatur dan mendaftarkan kelompok spesifik dan pimpinannya, menyusun peta

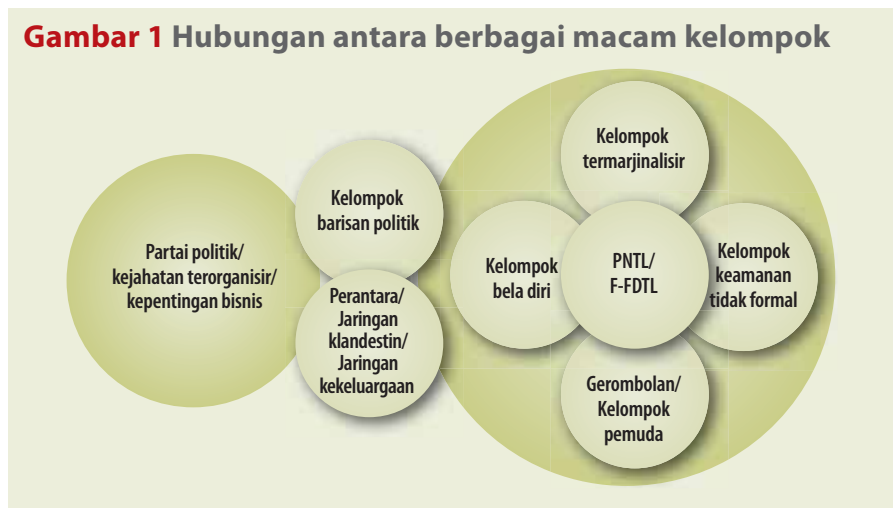
tentang daerah kekuasaan gerombolan, memantau hubungan antara politisi dan pemimpin gang, dan menunjuk petugas penghubung gerombolan di desa-desa kunci.

### Mengenai jenis kelompok bersenjata dan gerombolan

Untuk negara yang mana penduduknya tidak sampai satu juta orang, Timor Leste mempunyai banyak sekali kelompok yang beraneka macam, yang termasuk kelompok bela diri, gerakan sosial, gerombolan kecil yang berdiri di sudut jalan dan kelompok pemuda. Namun, seperti milisi pada 1999, mereka bukan fenomena baru yang terbentuk spontan saja. Walaupun ada kelompok lama, kebanyakan kelompok tersebut muncul selama periode militerisasi intensif di Timor Leste di bawah pendudukan Indonesia antara 1975 dan 1999.<sup>3</sup> Kebanyakan kelompok yang ada saat ini dibentuk untuk melawan pendudukan, atau seperti halnya dengan kelompok bela diri, muncul sebagai akibat dari upaya tentara Indonesia untuk melakukan pengendalian sosial. Walaupun sebagian besar kelompok tersebut dapat terdiri dari pemuda termarjinalisasi, keanggotaannya berasal dari semua sektor masyarakat, yang termasuk anggota dari polisi, tentara dan antara para elit politik dan ekonomi.

Proses untuk menjelaskan perbedaan antara kelompok tersebut cukup sulit dan akan menimbulkan perselisihan. Banyak kelompok mempunyai keanggotaan yang tumpang-tindih dan sejumlah sifat yang sama, seperti termasuk mantan veteran sebagai anggotanya atau dulu berbentuk sebagai organisasi klandestin. Kelompok-kelompok tersebut seringkali merubah bentuknya: misalnya, kelompok klandestin dan kelompok yang termarjinalisir, muncul sebagai akibat perlawanan terhadap pendudukan Indonesia, tetapi kemudian menjadi gerakan protes, atau membentuk partai politik atau menjadi sindikat kejahatan. Hanya tersedia sedikit sekali statistik yang handal tentang jumlah kelompok tersebut, dan statistik yang disampaikan di sini hanya berupa perkiraan. Hal ini disebabkan tidak adanya penelitian dalam dan karena kelompok tersebut suka membesar-besarkan jumlah anggotanya, yang naik-turun

**Gambar 1** Hubungan antara berbagai macam kelompok



dari waktu ke waktu karena pemisahan di dalam kelompok dan faktor lainnya. Namun, hubungan luas antara kelompok tersebut dapat digambarkan secara kasar (lihat Gambar 1).

Para pemimpin kelompok bela diri dan paramiliter pada umumnya menyangkal afiliasi politiknya. Yang tidak sama dengan sebagian milisi partai politik di Indonesia yang disebut Satgas (*satuan tugas*), ada hubungan yang tidak formal dan selalu berubah-ubah antara para politisi, gerombolan, kelompok bela diri dan kelompok paramiliter yang memiliki afiliasi politik yang berbeda di Timor Leste. Setiap kelompok dan partai dihubungkan oleh afiliasi pribadi, kekeluargaan dan klandestin, dan juga oleh keanggotaan yang tumpang-tindih. Banyak kelompok, pada khususnya kelompok bela diri mempunyai ikatan anggota atau kekeluargaan dengan partai politik utama, polisi dan angkatan bersenjata. Banyak anggota gerombolan juga adalah anggota kelompok bela diri atau kelompok lebih besar yang termarjinalisir dan lebih terpengaruh politik. Massa dapat dimobilisasi apabila perlu melalui perantara atau pengatur yang terpercaya, yang biasanya mempunyai hubungan keluarga dengan para politisi melalui jaringan tersebut. Hubungan formal sulit dibuktikan – kenyataan yang suka dieksploitasi oleh pemimpin gerombolan atau politisi. Tabel 1 meringkas berbagai macam kelompok berdasarkan daerah geografisnya, tanggal pembentukan, komposisi dan perkiraan tentang jumlah anggota, serta afiliasi politik dan sifat-sifat lain.

Pengangguran remaja adalah faktor utama dalam pertumbuhan kelompok tersebut. Kira-kira sepertiga dari angkatan kerja Dili yang berumur 25–29 adalah penganggur atau ‘hilang semangat’ (tidak lagi mencari pekerjaan). Angka ini meningkat sampai 60 persen antara remaja laki-laki, dan kira-kira 50 persen dalam kelompok umur 20–24.<sup>4</sup> Pengangguran diiringi oleh angka tinggi migrasi dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan, yang sebagian besar adalah pemuda, yaitu dari distrik-distrik ke Dili. Kira-kira 40 persen dari penduduk Dili terdiri dari migran internal, dan kebanyakan migrasi internal terjadi baru-baru ini. Angka-angka dalam Sensus 2004 mengungkapkan bahwa dalam waktu lima tahun saja, antara 1999 dan 2004, penduduk

Dili meningkat dari 100,715 sampai 173,541. Menurut sumber yang sama, 56,4 persen dari peningkatan ini disebabkan migrasi internal.<sup>5</sup>

Sebagaimana diamati di negara tetangga seperti Papua Nugini, angka tinggi migrasi dari daerah pedesaan ke kota dan pengangguran menimbulkan frustrasi dan tekanan sosial.<sup>6</sup> Para pemuda yang menanggung telah kehilangan percaya diri, dan hal ini diperburuk oleh status sosial mereka sebagai bawahan, karena banyak pemuda yang datang ke kota untuk mencari pekerjaan harus tinggal dengan kerabat dan seringkali menjadi tamu yang tidak disambut dengan baik. Sebagian menjadi pembantu rumah tangga saja.<sup>7</sup> Gerombolan dan kelompok bela diri menawarkan para pemuda tersebut persahabatan, status dan perlindungan, rokok dan alkohol yang gratis, dan seringkali juga memberikan sumber nafkah.

Walaupun gerombolan lokal kadang-kadang menimbulkan gangguan karena memeras bisnis lokal, minum alkohol, dan melakukan kekerasan, dalam banyak kasus mereka diterima sebagai bagian dari komunitas. Kadang-kadang anggota gerombolan bahkan menjadi tokoh kekuasaan, seperti kepala desa. Gerombolan juga memberi dukungan substansial dan seringkali merupakan satu-satunya sumber tunjangan dan kredit di desa miskin, dimana tidak ada, atau hanya sedikit sekali, orang yang mempunyai pekerjaan. Yang memprihatinkan, rupanya bahwa komunitas kurang memperhatikan penggunaan kekerasan untuk mencapai perubahan politik atau sosial. Telah ada banyak komentar tentang dukungan bagi tokoh yang menggunakan kekerasan seperti Mayor Reinado antara para pemuda yang termarjinalisasi di daerah perkotaan, tetapi jaringan pendukungnya lebih luas lagi, termasuk dalam para elit politik dan ekonomi serta antara kelompok masyarakat sipil yang menangani kekerasan jender dan hak asasi manusia.

Para elit politik tidak selalu memberi percontohan alternatif (positif) yang diperlukan untuk merubah sikap masyarakat. Partai politik tanpa rasa tanggungjawab telah menggunakan gerombolan sebagai penyedia keamanan pribadi dan penghasut, yang memperkuat kekuasaan kelompok tersebut dan membuatnya lebih menarik bagi remaja miskin yang ingin mencari pendapatan. Toleransi yang ditunjukkan

kepada Reinado dan para pemohon petisi, dan pengampunan yang diberikan kepada tokoh-tokoh utama yang berkaitan dengan kekerasan 2006, juga mengirim pesan yang tidak jelas kepada masyarakat, dan banyak pengamat takut bahwa hal-hal tersebut akan menciptakan iklim impunitas.

## Struktur Kelompok

Walaupun kelompok bela diri mempunyai struktur dan pimpinan pada tingkat nasional, para pemimpinnya rupanya tidak mempunyai pengendalian efektif pada organisasinya secara keseluruhan. Yang paling sering terjadi, mereka hanya mengendalikan bagian organisasi dimana mereka mempunyai ikatan pribadi atau kekeluargaan melalui sebuah hubungan yang mewajibkan kedua belah pihak.

Keanggotaan kelompok bela diri seringkali berafiliasi dengan hubungan kekeluargaan. Setiap pinggiran kota di Dili dibagi dalam kampung (*aldeia*). Setiap kampung kira-kira meliputi wilayah satu keluarga besar, dan kadang-kadang seluruh kampung dapat dimiliki oleh satu kelompok bela diri. Fenomena ini digarisbawahi oleh kenyataan bahwa kebanyakan konflik di Timor Leste terjadi antara satu kampung dengan kampung lain, bukan di dalam masing-masing kampung.<sup>8</sup> Yang kadang-kadang rupanya adalah sengketa antara kelompok bela diri sebenarnya adalah sengketa komunal, dan masing-masing komunitas memobilisasikan para pemudanya untuk membela wilayahnya. Pola ini terjadi di seluruh pelosok negara, sehingga kadang-kadang konflik lama disembunyikan oleh konflik antara kelompok bela diri atau gerombolan. Konflik yang mulai di daerah pedesaan dapat menyebar ke ibu kota, dimana satu keluarga menggunakan kelompok bela diri untuk menyerang keluarga lain – misalnya, karena sengketa tanah – dan berita disebarluaskan; kemudian anggota kelompok bela diri dari keluarga atau kerabat lainnya di ibu kota melibatkan diri dalam sengketa. Jadi, apa yang pada awalnya merupakan sengketa keluarga kemudian menjadi konflik umum antara masing-masing gerombolan.

Sebagian besar dari banyaknya kelompok pemuda atau gerombolan yang berdiri di sudut jalan, dan tersebar luas di seluruh Dili, dibentuk berdasarkan afiliasi keluarga. Beberapa keluarga dapat membentuk afiliasi dengan keluarga lain untuk memberi perlindungan kepada satu sama lain, yang memperluas konflik dan meliputi pihak-pihak yang tidak terlibat. Hal ini paling menonjol selama perkelahian yang terjadi di daerah Bairopite pada 2007, dimana kelompok-kelompok pemuda yang dikaitkan dengan beberapa keluarga bergabung untuk mengusir Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dari daerahnya, yang merupakan kelompok bela diri terbesar di Timor Leste.

Namun, kebanyakan kekerasan dari periode 2006 tidak diorganisir melalui gerombolan yang selaras dan seragam, tetapi melalui jaringan pribadi, keluarga, politik dan klandestin. Kebanyakan gerombolan tidak mempunyai

**Tabel 1** Jenis gerombolan dan kelompok lain di Timor Leste

Jenis kelompok dan contoh	Daerah geografis	Tanggal pembentukan	Komposisi dan jumlah anggota	Afiliasi politik dan sifat-sifat lain
<b>Kelompok yang termarjinalisir</b> <i>CPDRDL</i> <i>Colimau 2000</i> <i>Sagrada Familia</i>	Nasional tetapi pada umumnya paling kuat di daerah pedesaan tempat tinggal pemimpinnya	Sebagian besar pada awal tahun 2000-an, tetapi sebagian pada akhir tahun 1990-an	Lebih tua, penganggur, atau petani miskin dari daerah pedesaan, dan sebagian besar adalah mantan veteran Beberapa ribu anggota	Anti-pemerintah, tidak berafiliasi politik, kecuali sebagai oportunist Keluhan spesifik termasuk pekerjaan bagi veteran dan bantuan pemerintah untuk petanian Secara terus-menerus terlibat dalam demonstrasi yang melibatkan kekerasan dan tindakan lain
<b>Kelompok klandestin</b> <i>7-7</i> <i>5-5</i> <i>Bua Malus</i>	Nasional tetapi pada umumnya paling kuat di Dili dan distrik bagian barat	1980-an	Pada umumnya terdiri dari pemuda penganggur, termasuk anggota dari aparat keamanan; rata-rata berumur 16-35 tahun, tetapi para pemimpin adalah lebih tua Jumlah anggota kemungkinan besar berkisar antara empat-enam ribuan	Sering menyatakan dirinya netral tetapi kelompok-kelompok utama biasanya mengidentifikasi diri bersama salah satu partai utama dengan tergantung pada afiliasi pemimpinnya Bagian tertentu dari kelompok ini terlibat dalam kegiatan pidana dan juga dalam kekerasan 2006–7
<b>Kelompok bela diri*</b> <i>PSHT</i> <i>KORK</i> <i>Kera Sakti</i> <i>Kung Fu Master</i>	Nasional tetap sering berhubungan dengan desa khusus	Kebanyakan dibentuk selama pendudukan Indonesia pada tahun 1980-an, tetapi sebagian, misalnya KORK, menyatakan bahwa kelompoknya dibentuk sebelum pendudukan Indonesia	Umur tidak menentu, kedua jenis kelamin dan semua tingkat masyarakat, termasuk cendekiawan dan menteri; banyak anggota dalam aparat keamanan 15–20 kelompok dan sebanyak 90,000 anggota <sup>9</sup>	Sering menyatakan dirinya netral tetapi kelompok-kelompok utama biasanya mengidentifikasi diri bersama salah satu partai utama dengan tergantung pada afiliasi pemimpinnya ** Sebagian besar adalah organisasi olahraga yang sah, tetapi dimobilisasi oleh politisi untuk demonstrasi dan kekerasan, dan oleh sindikat kejahatan terorganisir untuk keamanan, pemerasan dan tindakan pidana lainnya
<b>Kelompok barisan politik</b> <i>MUNJ</i>	Sebagian besar berbasis di Dili	2006–07	Pimpinan biasanya lebih tua, biasanya mempunyai pekerjaan, dari kelas menengah	Massa yang dapat dibayar, yang dibentuk oleh partai politik oposisi agar dapat memobilisasi pemuda untuk demonstrasi; juga bertindak sebagai kelompok payung bagi berbagai macam kelompok pemberontak yang mempunyai hubungan dengan gerombolan
<b>Gerombolan</b> <i>Ameu Van Damme</i> <i>Commando Gerombolan</i> <i>Pasar Comoro</i>	Biasanya berbasis di Dili, paling sering berbasis di pinggiran kota yang didominasi oleh pendatang dari daerah pedesaan, di sekitar zona komersial utama, termasuk pasar-pasar	Sebagian dibentuk sebelum 1999 tetapi sebagian besar dibentuk setelah 2000	Umur tidak menentu, tetapi rata-rata antara remaja besar sampai awal dua puluh-an Gerombolan yang lebih besar mempunyai anggota rata-rata beberapa ratus, tetapi ada banyak sekali gerombolan yang berdiri di sudut jalan yang hanya mempunyai kurang-lebih sepuluh anggota	Dibayar oleh sindikat kejahatan terorganisir dan pemilik kepentingan bisnis, dan partai politik untuk melakukan pembakaran, intimidasi, dan kadang-kadang pembunuhan; mencari nafkah melalui pemerasan kecil, pencurian, dan penyediaan keamanan untuk perjudian tidak sah dan bordil; hanya sedikit gerombolan mempunyai nama resmi, yang terpusat pada satu tokoh penguasa yang lebih tua
<b>Kelompok pemuda</b> <i>Slebor</i> <i>Green Villa Blok M</i> <i>Aqui Jazz</i> <i>Predator</i>	Semua distrik tetapi paling banyak di Dili; lebih banyak anggota di tempat yang didominasi oleh pendatang dari daerah pedesaan	Sebagian besar dibentuk pada 1980-an tetapi banyak gerombolan baru dibentuk 2006-07	Sebagian besar adalah remaja besar sampai awal 20-an, sebagian kelompok mempunyai kedua jenis kelamin, dan semua tingkat sosial, tetapi sebagian besar adalah penganggur laki-laki Jumlah anggota berkisar antara sepuluh sampai ratusan	Biasanya tidak berafiliasi politik, tetapi kadang-kadang dimobilisasi untuk kekerasan; sebagian terlibat dalam penyerangan terhadap orang-orang Lorosa'e atas prakarsanya sendiri; sering mencari pendapatan melalui penyediaan keamanan kepada pemilik toko, pemerasan, dan pencurian kecil; banyak memberi pelayanan positif, tugas kewargaan, atau kegiatan olahraga, musik dan kesenian
<b>Kelompok keamanan tidak formal</b> <i>Para pemohon petisi</i> <i>Kelompok Railos</i> <i>Isolados</i>	Sebagian besar di daerah pedesaan di dataran tinggi barat, khususnya daerah perbatasan	Muncul selama periode pasca-kemerdekaan tetapi paling banyak selama periode akhir 2005–07	Sebagian besar adalah veteran yang lebih tua, tetapi sejumlah mantan serdadu F-FDTL dan petugas polisi Secara keseluruhan beranggota ratusan, tetapi hanya puluhan anggota di setiap kelompok	Anti-pemerintah, tidak berafiliasi politik, kecuali sebagai oportunist; keluhan utama adalah pekerjaan dalam F-FDTL; mempunyai akses pada senjata api buatan pabrik; walaupun dibubarkan untuk sementara, dapat bergabung kembali dalam waktu singkat

\* Laporan baru dari GTZ mengidentifikasi tiga jenis kelompok bela diri: (a) Kelompok bela diri yang memakai seragam putih, yang sangat teratur, tidak menggunakan kekerasan, dan menaati standar internasional tentang bela diri; (b) Kelompok bela diri yang berasal dari Indonesia, seperti PSHT dan Kera Sakti, tidak terlibat dalam kompetisi teratur di Timor Leste, dan terlibat dalam kekerasan; (c) Kelompok bela diri Timor Leste yang melakukan jenis bela diri pribumi, seperti KORK, dan dibentuk berdasarkan struktur gaya komando militer (sebagian terlibat dalam kekerasan).<sup>10</sup>

\*\* KORK misalnya berafiliasi dengan FRETILIN di bawah Nuno Soares, tetapi ketika pemimpin pertamanya Naimori dibebaskan dari penjara dia mengusir Soares dari KORK dan memutuskan afiliasi KORK dengan FRETILIN.

\*\*\* Istilah kelompok seni keagamaan kadang-kadang digunakan untuk menggambarkan kelompok seperti 7-7 dan Colimau 2000. Istilah ini sedikit menyesatkan karena banyak kelompok bela diri, seperti PSHT dan KORK, juga mempraktekkan ritual sinkretik yang dipercaya memberi kekuasaan gaib. Sejumlah kelompok bela diri yang berasal dari Indonesia dipengaruhi oleh ajaran kebatinan Jawa, dan percaya bahwa dengan mempraktekkan bela diri mereka akan memperoleh kekuasaan sebagai dukun.



Grafiti dari gerombolan yang ditulis pada rumah terlantar, Dili, 2008

© JAMES SCAMBURY

nama atau anggota tetap, dan lebih menyerupai jaringan pendukung yang berafiliasi dengan tokoh spesifik. Seringkali, tokoh tersebut adalah mantan aktivis atau pemimpin klandestin, atau kepala jaringan keluarga. Di bawah pendudukan Indonesia, banyak jaringan klandestin didasarkan jaringan kekeluargaan,<sup>11</sup> dan banyak gerombolan jaman sekarang mempunyai struktur yang serupa. Para pemimpin dari gerombolan tersebut juga membina kesetiaan dengan meminjamkan uang, memberi rokok, alkohol atau melalui ketakutan. Banyak dari tokoh tersebut melakukan pemerasan, dan membagi keuntungan antara komunitas lokal untuk meningkatkan statusnya. Para pemuda belum tentu dibayar untuk melakukan tindakan pidana, tetapi mereka barangkali mendapatkan motivasi yang lebih berdasarkan kesetiaan dan kewajiban. Apabila partai politik atau tokoh bisnis perlu memobilisasi massa, tokoh tersebut bertindak sebagai perantara atau pengatur. Kira-kira enam tokoh kuat yang berbasis di Dili memiliki jaringan kekuasaan yang luas, dan mereka dapat memanggil tokoh yang mempunyai status lebih rendah, yang berbasis di daerah lokalnya, untuk memobilisasi para pemuda dalam jumlah besar, misalnya, untuk menargetkan kamp-kamp pengungsi dalam negeri atau melakukan intimidasi pada saingan bisnis.

## Sumber pendapatan

Kegiatan pemerasan adalah sumber besar pendapatan bagi kebanyakan gerombolan, dan oleh karena itu, merupakan gangguan utama bagi bisnis dan mencegah investasi. Kegiatan pemerasan mempengaruhi semua jenis bisnis, termasuk kios kecil di sudut jalan dan juga perusahaan konstruksi besar dan tokoserba. Pasar, terminal bis dan tokoserba milik orang Cina sangat rentan. Walaupun sebagian bisnis secara sukarela menyetujui kontrak tidak resmi dengan kelompok tertentu agar dilindungi dari serangan, pemerasan sudah menjadi kebiasaan – yang kadang-kadang disebutkan ‘pajak’ atau ‘sumbangan’. Dalam banyak kasus, pemerasan ini berskala kecil dan dilakukan oleh gerombolan yang berdiri di sudut jalan, tetapi kelompok tersebut semakin sering bertindak

atas nama kelompok yang lebih besar, termasuk kelompok kejahatan terorganisir asal Indonesia atau Cina.<sup>12</sup> Pertumbuhan jumlah perusahaan yang menyediakan keamanan profesional dalam waktu singkat juga memicu konflik, karena mereka bersaing dengan gerombolan atas sumber utama pendapatannya.<sup>13</sup>

Pemerasan dapat dilakukan pada skala yang lebih besar, seperti kelompok yang ingin memperoleh keuntungan dari ketidakamanan. Sebagian gerombolan yang mempunyai keterlibatan besar dalam kekerasan 2006 kemudian memberitahu para pendonor (yang harus membayar sejumlah uang) bahwa mereka adalah mediator, yaitu, merekalah yang terlebih dahulu menciptakan masalah, dan kemudian pura-pura bahwa mereka mampu memecahkan masalah tersebut.

Selain memberi keamanan, gerombolan juga bertindak sebagai massa yang dapat dimobilisasi oleh politisi korup, pemilik tanah dan kelompok kejahatan terorganisir. Pada khususnya selama kekerasan 2006, ada banyak laporan kredibel bahwa anggota gerombolan menerima uang karena memicu kekerasan dan melakukan serangan.<sup>14</sup> Penggunaan gerombolan dan kelompok paramiliter untuk keamanan pribadi dan intimidasi diterima secara luas, misalnya, para pemimpin CNRT mengirim pesan yang salah ketika mengangkat Vicente da Conceição, alias Railos, untuk mengkoordinasikan kampanye di Liquiçá walaupun sudah ada rekomendasi dari Komisi Penyelidikan PBB untuk menuntut dia atas peranannya dalam kekekacauan 2006.<sup>15</sup>

Penjudian, yang termasuk mesin poker, adu-ayam, undian tidak sah dan jenis perjudian yang lebih tradisional, juga dapat menjadi sumber yang memberi banyak keuntungan – yang meningkat dengan kedatangan operasi mesin poker yang canggih dengan penerimaan uang dalam jumlah yang jauh lebih besar. Sekali lagi, ada kemungkinan besar bahwa operasi seperti ini adalah bagian dari kejahatan terorganisir, tetapi gerombolan lebih kecil, pada khususnya kelompok-kelompok bela diri yang mempunyai banyak anggota, menyediakan keamanan untuk operasi tersebut, seperti diberikannya untuk diskotek atau bordil yang semakin banyak dengan adanya peningkatan orang internasional.

Sebagai akibat dari kekerasan 2006–2007, Dili sekarang terbagi dalam daerah yang dikendalikan oleh gerombolan tertentu yang mempunyai hak eksklusif atas keuntungan dari kegiatan tidak sah tersebut.

Munculnya perdagangan manusia dan obat terlarang yang masih berkembang di Timor Leste berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tidak sah dapat menimbulkan lebih banyak keuntungan bagi kelompok bela diri dan gerombolan, dan meningkatkan kemungkinan bahwa kekerasan akan muncul karena persaingan, dengan mengingat bahwa sebagian kelompok tersebut mempunyai banyak sekali anggota. Penarikan uang dari pendapatan minyak untuk dana pembangunan dan perkembangan pesat dalam bidang konstruksi tanpa pengaturan ketat, yang mana didukung oleh kehadiran lebih banyak orang internasional, menarik perhatian para pelaku kejahatan internasional yang terorganisir, dan oleh karena memberi kesempatan bisnis kepada kelompok bela diri dan gerombolan tersebut.

## Peningkatan jumlah: kelompok sejak krisis 2006 sampai hari ini

Sebelum konflik 2006, gerombolan bersenjata, kelompok paramiliter dan kelompok bela diri secara terus-menerus muncul selama periode pasca-kemerdekaan, walaupun jarang dilaporkan. Kekerasan yang merajalela di ibu kota dan daerah-daerah pedesaan selama krisis April dan Mei 2006, yang mengakibatkan pemusnahan sebanyak 6,000 rumah dan pemindahan lebih dari 140,000 orang, menunjukkan dahsyatnya penghancuran yang dapat dilakukan oleh kelompok tersebut.

Selama krisis politik terjadi, keributan mulai memecah antara kelompok etnis dari bagian timur dan bagian barat di setiap pelosok Dili, yang secepatnya memicu perkelahian skala besar di jalan. Ada empat sumber utama untuk kekerasan ini:

- **Sengketa hak milik.** Diperkirakan bahwa setelah para pengungsi melarikan diri pada 1999, 50 persen dari rumah di Dili diambilalih secara tidak sah.<sup>16</sup> Kekerasan umum digunakan sebagai alasan untuk mengusir pendatang yang sebagian besar berasal dari bagian timur dari rumah yang disengketakan. Ada juga bukti kuat bahwa kekerasan ini memberi alasan kepada para pengembang properti yang korup untuk menggusur tanah untuk pembangunan, dan gerombolan-gerombolan diberi daftar penghuni yang perlu diusir.<sup>17</sup>
- **Persaingan atas daerah kekuasaan gerombolan.** Setelah 1999 gerombolan-gerombolan dari bagian timur pindah ke Dili dan mengendalikan kegiatan pemerasan dan pekerjaan di dua pusat komersial utama – yaitu, pasar dan terminal bis – selain perjudian tidak sah dan penyediaan keamanan di diskotek dan bordil yang tidak sah. Walaupun banyak kelompok terlibat, sebagai akibat dari kekerasan 2006, empat gerombolan utama dari bagian barat sekarang mendominasi kegiatan pemerasan di Dili.

## Kotak 1 Kronologi krisis politik 2006

- 16 Maret: 594 serdadu F-FDTL dipecat karena meninggalkan tugas militer
- 24 April: Sekelompok serdadu yang telah dipecat, yang disebut para pemohon petisi, serta para pendukungnya mengadakan demonstrasi di luar Parlemen
- 28 April: Demonstrasi ini memicu kerusuhan dan dua orang mati
- 3 Mei: Mayor Alfredo Reinado meninggalkan polisi militer F-FDTL, dan membawa sejumlah petugas polisi militer lainnya, beberapa petugas PNTL serta sejumlah senjata
- 23 Mei: Lima orang dibunuh dalam konfrontasi bersenjata antara F-FDTL dan Reinado
- 24 Mei: Serangan pada kediaman Komandante F-FDTL Brigadir Jenderal Ruak oleh sepuluh petugas PNTL yang dipimpin oleh wakil komandan PNTL Abilio Mesquita (yang juga adalah warga atau guru PSHT) dan anggota Parlemen Leandro Isaac. Satu orang mati dan dua orang terluka
- 24–25 Mei: Sembilan orang mati ketika para pemohon petisi dan sekelompok yang dipimpin oleh mantan anggota F-FDTL Vicente de Conceicao alias Railos menyerang markas F-FDTL di Tasi Tolu
- 25 Mei: Sembilan anggota PNTL mati dalam konfrontasi antara F-FDTL dan PNTL di markas PNTL Dili; sebagian besar struktur PNTL ambruk di Dili
- 26 Juni: Perdana Menteri Mari Alkatiri mengundurkan diri dan Menlu Jose Ramos Horta ditunjuk sebagai perdana menteri sementara

Sumber: OHCHR (2006), h. 5–7

- **Kekerasan yang terorganisir.** Terdapat banyak laporan yang kredibel bahwa para anggota gerombolan dibayar untuk memicu kekerasan,<sup>18</sup> dan serangan pada kamp pengungsi dan daerah lain mengikuti pola yang sama dan konsisten. Massa diangkut dengan truk secara teratur dari distrik-distrik, yang diadakan dan didanai oleh kelompok barisan politik seperti Barisan Nasional untuk Keadilan dan Perdamaian atau sekutu politiknya seperti Colimau 2000. Beberapa saksi menjelaskan bagaimana massa dikoordinasikan lewat radio, dan sejumlah radio milik polisi ditemukan dalam razia yang dilakukan atas markas suatu gerombolan pada Januari 2007.<sup>19</sup>
- **Dendam.** Selain kemarahan atas pembunuhan anggota-anggota PNTL pada tanggal 25 Mei, desas-desus yang tidak berdasar disebarluaskan bahwa 60 orang dibunuh oleh F-FDTL. Banyak orang menyatakan bahwa hal ini adalah sumber perasaan anti-timur, dan F-FDTL, Perdana Menteri Mari Alkatiri, *Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente* (FRETILIN), dan semua orang asal timur dicemarkan secara kolektif. Desas-desus ini mempertajam ingatan yang menyedihkan tentang kekejaman yang dilakukan oleh FRETILIN dalam perang sipil 1975 (walaupun kedua belah pihak melakukan kekejaman).

Walaupun kekerasan pada umumnya berhenti ketika Perdana Menteri mengundurkan diri pada Juni, namun kekerasan tetap dilanjutkan pada tingkat lebih rendah sampai pembicaraan perdamaian pada Oktober mencapai kesepakatan damai melalui Kantor Presiden. Hampir seketika setelah krisis politik ini diselesaikan, konflik baru memecah pada November antara Colimau 2000 dan PSHT, yang adalah kelompok bela diri terbesar, yang tersebar dari distrik Ermera di bagian barat sampai distrik-distrik tetangga dan kemudian sampai Dili, dimana tujuh orang mati. Sumber dari konflik ini tidak jelas, tetapi

ada sengketa lama antara kedua kelompok tersebut di Ermera, yang berakar pada tekanan historis antara sejumlah desa yang muncul ratusan tahun yang lalu. Ada juga indikasi jelas tentang persaingan antara kelompok-kelompok tersebut untuk menguasai penyelundupan lintas perbatasan, pada khususnya di sekitar pasar perbatasan di Maliana.

Persekutuan lebih luas dibentuk secepatnya untuk melawan PSHT, yang terdiri dari kelompok-kelompok klandestin dan Kmanek Oan Rai Klaran (KORK—kelompok bela diri satu laginya yang besar). Persekutuan ini menyatakan secara publik bahwa justifikasi untuk perkelahian karena PSHT adalah kelompok yang disponsor oleh Indonesia. Namun, lebih mungkin bahwa alasannya, sebagaimana disebutkan oleh banyak kelompok yang tidak terkait, adalah upaya agresif dari PSHT untuk menguasai wilayah dan mengontrol keamanan, pemerasan, dan kegiatan lain yang tidak sah.

Dialog yang dimediasi oleh Kantor Perdana Menteri membuat mayoritas kelompok pelawan menarik diri dari sengketa ini, tetapi konflik antara kelompok yang disebut 7-7 dan PSHT merajalela selama 2007, dengan peningkatan drastis setelah ada percobaan untuk menangkap Reinado pada Maret oleh Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang terdiri dari pasukan tentara Australia dan Selandia Baru, dan menjelang pemilihan parlemen pada Agustus. Kekerasan ini sangat intensif di distrik Baucau dan Viqueque di bagian timur, walaupun konflik komunal di wilayah tersebut muncul jauh sebelum pembentukan partai politik dan gerombolan kontemporer. Sebagian konflik ini dapat dikaitkan dengan pemindahan terpaksa yang dilakukan selama pendudukan Indonesia dan penolakan pendatang untuk kembali pada tanah aslinya.<sup>20</sup> Sengketa tanah yang serupa menyebabkan konflik komunal lainnya di

wilayah pedesaan tersebut, dan sebagian dari sengketa ini muncul lebih dari 70 tahun yang lalu.

Tekanan mulai mereda pada awal 2008, dan walaupun ada keprihatinan bahwa kematian Reinado yang terjadi dalam serangan pada 11 Februari 2008 akan mengakibatkan peningkatan besar kekerasan, hal ini tidak terjadi. Menyusul proses perdamaian yang berlangsung cukup lama, dua kelompok utama yang terlibat dalam perkelahian, PSHT dan 7-7, mencapai kesepakatan damai yang formal pada Agustus 2008.

## Jawaban pada kekerasan gerombolan

Kemajuan signifikan dicapai selama tahun ini dalam mediasi konflik dan upaya untuk menyelesaikan persoalan kompleks di Timor Leste tentang kepemilikan tanah. Pemerintah dan komunitas-komunitas berusaha keras untuk menjamin bahwa para pengungsi yang kembali diterima oleh masyarakat, dan ada periode ketenteraman yang berkelanjutan sejak serangan dilakukan pada kedua kepala negara pada Februari 2008. Ada upaya untuk melaksanakan kebijakan nasional tentang pemuda dan program-program yang sedang berlangsung untuk memperkuat sistem peradilan dan memperbarui sektor keamanan. Walaupun upaya-upaya ini sangat penting untuk memperhatikan persoalan lintas bidang yang lebih luas, yang sebelumnya memicu konflik, ada kebutuhan untuk program dan kebijakan yang selaras, konsisten dan dipertahankan yang secara khusus dapat menangani masalah gerombolan dan kelompok bela diri. Selama ini tidak banyak dilakukan, walaupun ada berbagai upaya, yang termasuk pendekatan aparat keamanan, baik lokal maupun internasional, untuk menegakkan hukum, serta pendekatan yang lebih mempromosikan rekonsiliasi dari pemerintah dan masyarakat sipil. Upaya-upaya ini mencapai hasil-hasil yang kurang memuaskan.

## Jawaban pemerintah

Pada 27 Mei 2005, dengan dukungan dari *Asia Foundation*, Forum Komunikasi untuk Kelompok Bela Diri Timor Leste (FORKAMTIL) dibentuk kembali, setelah upaya sebelumnya gagal pada 2003. Forum ini dibentuk di bawah Kantor Presiden untuk membantu menyelesaikan konflik antara kelompok-kelompok bela diri. FORKAMTIL terdiri dari 14 kelompok bela diri, termasuk kelompok kedua yang terbesar, PSHT dan KORK.<sup>21</sup> Organisasi ini mengadakan beberapa lokakarya latihan di distrik pedesaan (tidak termasuk Dili) tentang kepemimpinan dan pengelolaan konflik, dan menegosiasikan kode tingkahlaku yang disetujui oleh para pemimpin dari kelompok-kelompok utama pada 2006. Sayangnya, persetujuan ini hanya berlaku untuk sementara, karena sebagian besar dari kelompok tersebut tidak dapat mengendalikan berbagai faksi dan cabang lokal, khususnya di daerah pedesaan yang terpencil. FORKAMTIL masih ada, tetapi dananya habis pada Mei 2007.<sup>22</sup>

Kantor Presiden juga merancang proses dialog pada akhir 2006 untuk menyelesaikan kekerasan timur-barat. Sebuah kelompok yang terdiri atas

## Kotak 2 Peranan senjata api

Walaupun ada setidaknya-tidaknya 100 kematian yang berhubungan dengan gerombolan pada 2007, sebagian besar konfrontasi antara gerombolan melibatkan pelemparan batu, dengan jarak yang cukup jauh. Kematian pada umumnya disebabkan oleh senjata tidak canggih yang dapat dibuat sendiri dengan mudah dan cepat. Selain daripada berbagai jenis tombak dan anak panah yang dibuat dari kayu, senjata yang paling sering digunakan adalah *rama ambon*, anak panah tidak canggih yang dibuat dari kabel listrik atau bekas paku. Anak panah tersebut dilemparkan dari katapel yang dibuat dari karet, dan kadang-kadang ujungnya direndam dalam racun atau air aki. Dari jarak dekat senjata ini mematikan, tetapi pada umumnya ditembakkan ke udara dari jarak jauh dan sering dapat dilihat terjepit di atas pohon dan tiang telepon.

Rakitan, atau senjata api tidak canggih yang diisi dari depan, juga berbahaya. Rakitan dapat dimodifikasi untuk menembakkan paku, *rama ambon*, anak panah, dan bahkan peluru asli; dan walaupun beberapa rakitan mempunyai pelatuk, sebagian besar rakitan tidak dilengkapi pelatuk. Pada jarak jauh yang biasanya memisahkan gerombolan-gerombolan yang sedang berkelahi, rakitan ini mempunyai bentuk yang realistis dan cukup menakutkan. Bahan peledak tidak canggih yang termasuk bom molotov, juga digunakan, tetapi kecuali satu serangan terkenal pada kamp pengungsi pada 2006, senjata ini tidak digunakan secara luas.<sup>23</sup>

Walaupun para anggota gerombolan kadang-kadang berbicara tentang aturan tidak resmi yang melarang penggunaan senjata buatan pabrik, tidak diragukan bahwa sebagai akibat hubungannya dengan aparat keamanan, semua gerombolan besar mempunyai akses pada senjata tersebut. Satu faktor yang mencegah penggunaan senjata api barangkali adalah kenyataan bahwa sengketa komunal kadang-kadang mengadudombakan mantan teman dan tetangga, dan mereka sungguh tidak mau mengakibatkan luka berat pada mantan teman.



'Rama Ambon' yang dikumpulkan dalam razia polisi, Dili, 2008  
© JAMES SCAMBARBY

Rupanya bahwa kebanyakan kematian terjadi pada jarak dekat dalam penghadangan yang dimotivasi dendam. Penggunaan senjata api buatan pabrik di negara tetangga Papua Nugini meningkatkan kekerasan secara serius di sana,<sup>24</sup> tetapi gerombolan-gerombolan di Timor Leste selama ini rupanya menaati 'kode tidak tertulis'. Sampai sekarang, hanya anggota gerombolan dari PNTL menggunakan senjata api.

## Upaya dari masyarakat sipil

Proyek latihan bagi kelompok-kelompok bela diri yang diadakan oleh *Action Asia/Hak Association* merupakan proses yang paling komprehensif dan konstan selama ini yang dipimpin oleh masyarakat sipil untuk secara khusus memperhatikan kekerasan gerombolan dan kekerasan kelompok bela diri. Proyek ini, yang dimulai pada September 2006, adalah hasil kemitraan antara dua NGO internasional, *Concern* dan *Oxfam*, dan dua NGO nasional, Yayasan Hak dan *NGO Forum*. Action Asia, sebuah jaringan regional yang berfokus pada pembentukan perdamaian, diundang untuk menjalankan proyek. Dua anggota (satu yang tua, satu yang muda), dari kesembilan kelompok bela diri utama yang masih aktif, dipilih untuk ikutserta dalam kursus kolektif yang berjalan selama satu tahun tentang pembentukan perdamaian. Satu bagian dari kursus ini termasuk kunjungan peningkatan kesadaran ke Filipina, dimana mereka bertemu dengan kelompok-kelompok utama yang menjalankan peranan untuk mempromosikan perdamaian dan menghindari kekerasan di negara itu, termasuk anggota gerombolan yang dipenjarakan, kelompok-kelompok solidaritas, dan para peguvas tentara Filipina.

Walaupun salah satu antara kedua kelompok utama yang terlibat dalam perkelahian, 7-7, pada awalnya tidak terlibat, kelompok ini mengikuti modul terakhir dalam kursus dan kemudian membuat kesepakatan perdamaian dengan PSHT pada 27 Agustus 2008, dan mengakhiri konflik lama antara kedua kelompok tersebut.<sup>27</sup>

Banyak lembaga masyarakat sipil dan internasional memberi jawaban pada kekerasan komunal melalui mediasi tradisional. Sejumlah lembaga mencoba untuk menggunakan upacara tradisional dan tokoh adat, dan mencapai keberhasilan tertentu. Namun, konflik komunal dan konflik gerombolan tumpang-tindih, yang dapat mengganggu kesepakatan perdamaian, dan demikian pula hubungan antara sengketa komunal di daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Kebanyakan upaya untuk menggunakan mediasi tradisional menangani konflik pada tingkat komunitas, dan oleh karena itu tidak mempertimbangkan persaingan antara masing-masing gerombolan. Para anggota kelompok bela diri yang pindah dari distrik-distrik ke ibu kota, atau di dalam ibu kota, kadang-kadang memicu kembali konflik, karena mereka tidak terlibat dalam kesepakatan pertama. Juga, kebanyakan pemicu kekerasan adalah pendatang dari daerah pedesaan dimana kepala desa yang tersangkut tidak memiliki kewenangan. Banyak kepala desa juga tidak dapat bertindak secara optimal karena sudah jelas terpengaruh kepentingan politik.<sup>28</sup>

Proses-proses mediasi tradisional dengan gerombolan dan kelompok bela diri barangkali akan sangat efektif dengan meningkatnya penghargaan atas hukum adat masih sangat kuat di Timor Leste. Seperti dikatakan oleh seorang pemimpin kelompok bela diri, "Tuhan terima kamu jika sudah mati; *lulik* (hukum sakral) bunuh kamu sekarang."<sup>29</sup> Sebuah proses

para pemimpin dari kelompok-kelompok utama yang sebelumnya terlibat dalam perkelahian mengadakan serangkaian 'demonstrasi perdamaian' menjelang peringatan pembunuhan massal di Santa Cruz pada tanggal 12 November untuk mempromosikan hasil dialog dalam masyarakat. Walaupun tekanan timur-barat belum diselesaikan secara tuntas, kesepakatan damai ini pada umumnya dipertahankan.

Pada waktu yang sama, Perdana Menteri sementara Ramos Horta membuka proses dialog yang terpisah pada akhir November 2006 untuk memediasikan konflik baru antara PSHT dan persekutuan kelompok-kelompok lain. Sebagai akibat dari dialog ini, sebuah proposal diajukan untuk membentuk unit bantuan reaksi cepat yang terdiri atas wakil-wakil dari setiap kelompok. Unit yang diusulkan akan dimobilisasi apabila kelompok bela diri terlibat dalam kekerasan.<sup>25</sup> Proses ini berhasil mengendalikan kegiatan kebanyakan kelompok yang terlibat, tetapi konflik antara PSHT dan 7-7 berlanjut sampai akhir 2007. Kementerian Tenaga Kerja dan Reintegrasi Komunitas (MTRC) juga terlibat dalam proses dialog nasional, karena membentuk Forum Nasional untuk Dialog antara Kelompok-Kelompok Bela Diri setelah krisis politik pada April-Mei 2006, yang mana sebagian besar

anggotanya berasal dari keempat kelompok utama yang berkelahi: Colimau 2000, PSHT, KORK dan 7-7. Walaupun forum ini sebenarnya dimaksudkan sebagai upaya sementara, MRC ingin melanjutkan pekerjaannya bersama kelompok-kelompok bela diri.<sup>26</sup>

Kementerian Solidaritas Sosial (MSS), yang didukung oleh Program Pengembangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, melakukan proses dialog yang berkelanjutan untuk memfasilitasi pengembalian para pengungsi ke desa-desanya. MSS baru-baru ini meluncurkan upaya dialog yang baru, dimana lima tim mediasi bekerja di kelima sub-distrik di Dili. Walaupun proses ini tidak secara khusus berfokus pada kelompok-kelompok bela diri, upaya ini merupakan proses dialog komunitas yang paling komprehensif yang mungkin akan mengurangi kekerasan antara kelompok-kelompok bela diri.

Akhirnya, atas prakarsa Sekretaris Negara untuk Pemuda dan Olahraga dan sebagian pemimpin kelompok bela diri yang lebih moderat, sebuah undang-undang dirancang untuk mengatur kelompok bela diri secara lebih ketat. Undang-undang ini diserahkan kepada Dewan Menteri dan disetujui oleh Perdana Menteri, tetapi belum disahkan oleh Parlemen.

mediasi yang didanai oleh GTZ/EU<sup>30</sup> membantu proses dialog nasional dengan maksud untuk membuka dialog antara kelompok-kelompok bela diri, dan termasuk pengembangan kapasitas organisasional, khususnya latihan keterampilan tentang kepemimpinan dan transformasi konflik.<sup>31</sup>

## Jawban dari aparat keamanan

Aparat keamanan biasanya menggunakan pendekatan reaktif untuk mengendalikan kekerasan gerombolan. *Formed police unit* (FPU), polisi PBB (UNPOL) dan ISF melakukan tindakan reaksi cepat terhadap kekerasan gerombolan, selain melakukan patroli teratur dan membentuk pos polisi tetap di sejumlah daerah kritis. Namun, dua upaya kunci telah dilaksanakan yang secara khusus berfokus untuk melawan kekerasan gerombolan, yang juga memberi contoh tentang upaya pemolisian komunitas yang berhasil.

Sebagai jawaban terhadap kekerasan gerombolan yang meningkat, pada Januari 2007 Misi Terpadu Persekutuan Bangsa-Bangsa di Timor Leste (UNMIT) mengesahkan pembentukan Satgas Gerombolan, dengan anggota dari Seksi Hak Asasi Manusia dan Seksi Urusan Politik dari UNMIT, serta PNTL dan ISF. Satgas Gerombolan terlebih dahulu mencoba melakukan mediasi antara kelompok-kelompok yang berkelahi, dan mengadakan pembicaraan tingkat tinggi dengan para pemimpin dari kelompok-kelompok utama pada 24 Januari di markas PNTL Dili. Ketika upaya ini gagal, melalui kerjasama dengan Satgas Gerombolan, UNPOL, FPU dan ISF melakukan razia di markas kelompok bela diri terbesar, yaitu PSHT. Tindakan ini merupakan operasi terbesar yang pernah dilakukan terhadap gerombolan, dan sebagai akibat dari razia ini pemimpin PSHT dan sekitar 47 anggotanya ditangkap, serta penyitaan berbagai macam senjata, termasuk anak panah buatan sendiri, alat pembakar, seragam-seragam polisi dan radio.<sup>32</sup>

Razia ini mencapai hasil positif dan negatif. Ada kritikan bahwa razia ini menciptakan kekosongan yang sebenarnya meningkatkan kekerasan: gerombolan lain masuk wilayah kosong dan membakar markas PSHT dan rumah-rumah lain yang dimiliki keluarga anggota gerombolan, yang memicu kekerasan yang dimotivasi dendam. Walaupun razia tersebut menghentikan kekerasan di sekitar markas PSHT saja, ternyata kekerasan berlanjut di daerah-daerah lain, dan pemimpin-pemimpin lainnya secepatnya mengisi kekosongan.

Secara terpisah, Satgas baru dari PNTL dibentuk pada akhir 2007 oleh Sekretaris Negara untuk Keamanan. Satgas ini dilengkapi dengan peralatan anti huru-hara, dan dimaksudkan sebagai unit berpindah-pindah yang dapat memberi reaksi cepat untuk mengendalikan kerumunan orang. Walaupun rupanya bahwa Satgas ini cukup efektif untuk melawan kekerasan gerombolan dan kekerasan komunal, Satgas ini dikritik secara luas karena tidak berkomunikasi dengan ISF atau UNPOL, dan bereputasi buruk karena melakukan brutalitas. Rupanya juga bahwa Satgas ini melakukan tugas yang sama

dengan Unit Reaksi Cepat dari PNTL yang bernama UIR.<sup>33</sup>

Akhirnya, pada akhir November 2007 UNPOL melakukan dua razia yang berhasil di Bairopite, sebuah pinggiran kota dalam Dili yang sering tertimpa kekerasan. Keberhasilan operasi ini sebagian besar dapat dihubungkan dengan pendekatan konsultatif yang digunakan, dimana para kepala desa lokal dikonsultasi dan bahkan menemani pengeledahan, dan formulir persetujuan yang telah ditandatangani dapat diperoleh dari semua pemilik rumah yang digelegah.

## Kesimpulan

Kekerasan kelompok dan kekerasan gerombolan di Timor Leste berfluktuasi dari waktu ke waktu, tetapi ada bukti kuat bahwa keanggotaan dalam kelompok-kelompok tersebut meningkat dan menjadi lebih beraneka ragam selama beberapa tahun terakhir ini. Pemerintah dan masyarakat sipil mengambil sejumlah langkah untuk mengelola dan mengurangi dampak dari kecenderungan ini, tetapi lemahnya dari keinginan politik, koordinasi dan alokasi dana telah membatasi ruang lingkup kegiatan. Hal ini memprihatinkan, karena masih diperlukan upaya-upaya yang lebih intensif untuk berfokus pada sejumlah aspek.

Banyaknya upaya mediasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ada keperluan untuk membentuk komite koordinasi untuk mediasi konflik sebagai langkah pertama untuk menstandarisasi dan mengkoordinasi pendekatan, mengumpulkan dana, membagi pengetahuan, dan meningkatkan keahlian dalam menangani masalah gerombolan. Demikian pula, hubungan antara kekerasan gerombolan dan kekerasan komunal menggarisbawahi keperluan untuk mengintegrasikan mediasi gerombolan dalam program mediasi konflik di komunitas.

Selain daripada upaya pencegahan kekerasan akut seperti tersebut di atas, ada keperluan untuk upaya selama jangka panjang yang dapat memperhatikan mengapa seorang mempunyai motivasi dasar untuk menjadi anggota dalam gerombolan. Apabila mengikutsertakan para anggota dari masing-masing gerombolan dalam program sosial dan program latihan usaha kecil, maka akan memberi kesempatan yang bermanfaat untuk keluar dari siklus kekerasan dan persaingan antara masing-masing gerombolan.

Pengidentifikasi dan pemantauan anggota gerombolan yang dipekerjakan oleh negara juga adalah tindakan penting untuk menghambat hubungan tersebut. Aparat keamanan harus diwajibkan untuk mengungkapkan



Ibu dan anak berdiri di depan lambang gerombolan, Dili, 2008  
© JAMES SCAMBARY

keanggotaannya dalam kelompok bela diri dan gerombolan, agar dapat secara lebih efektif mengendalikan pengaruh dari kelompok-kelompok tersebut pada anggota individu dalam aparat negara; daftar keanggotaan kelompok bela diri akan merupakan instrumen berguna untuk melacak orang-orang tersebut. Akan bermanfaat juga jika para politisi dan pegawai negeri diwajibkan untuk mengungkapkan afiliasinya. Transparansi dengan sendirinya dapat merupakan instrumen dahsyat.

Akhirnya, sudah jelas bahwa gerombolan bereaksi pada kekurangan yang diduga dan yang nyata dalam sektor keamanan dan peradilan di Timor Leste, dan bahwa konteks ini kemungkinan kecil akan berubah dalam waktu dekat ini. Namun polisi dan reformasi keadilan dapat menjembatani perselisihan antara pemerintah dan warganegaranya, membangun kembali kepercayaan dan memberi pelayanan yang berarti, sehingga upaya-upaya tersebut tentu saja akan membantu mengurangi gerombolan dan keanggotaan gerombolan, serta kekerasan yang berkaitan dengan gerombolan.

## Catatan

*Laporan Singkat ini didasarkan riset oleh James Scambary, yang melakukan penelitian tentang gerombolan di Timor Leste sejak 2006 untuk AusAID dan seksi Forum Pencegahan Konflik dan Perdamaian (CPPF) dari New York Social Science Research Council.*

- 1 FALINTIL-Forças de Defesa de Timor-Leste (FALINTIL: Forças Armadas de Libertacao Nacional de Timor-Leste).
- 2 Polisi Nasional Timor-Leste.
- 3 Lihat, misalnya *Laporan Singkat* TLAVA No. 1.
- 4 Neupert dan Lopes (2006), h. 22.
- 5 Ibid., h. 22.
- 6 Ward (2000), h. 231.

7 Wawancara dengan Fidelis Magalhaes, Petugas Proyek Mediasi Kelompok Bela Diri, Dili, 31 Januari 2008.

8 Wawancara dengan Susana Barnes, peneliti dari *Australian National University* tentang persolan tanah dan hak milik, Dili, 19 Januari 2008.

9 Ostergaard (2005), h. 22–3.

10 GTZ (2007).

11 McWilliam (2005), h. 39.

12 Wawancara dengan petugas senior PNLT, Dili, 31 Januari 2008.

13 Wawancara dengan petugas senior PNLT, Dili, 31 Januari 2008.

14 'Magic And Mayhem: Gang Culture Threatens E.Timor', *South China Morning Post*, 6 Desember 2007.

15 ICG (2008), h. 18.

16 Neupert and Lopes (2006), p. 33.

17 Harrington (2006), h. 47.

18 Wawancara dengan petugas UNPOL, Dili, 29 Januari 2008.

19 Siaran UNPOL, 1 Februari 2007.

20 Oxfam Timor-Leste (2003).

21 'Deklarasi Bersama dari Organisasi Bela Diri', Dili, 30 Juni 2005

22 GTZ (2007), h. 26.

23 Wawancara dengan petugas UNPOL, Dili, 29 Januari 2008.

24 Lihat Haley dan Muggah (2006), Alpers (2005), serta Thompson dan Dinnen (2004) untuk peninjauan tentang berbagai macam dampak dari kekerasan bersenjata pada komunitas perkotaan dan pedesaan di daerah Pasifik.

25 Republik Demokratis Timor Leste (2006).

26 GTZ (2007), h. 27.

27 UNMIT (2008).

28 Wawancara dengan staf dari *Catholic Relief Services*, Dili, 31 Januari 2008.

29 Wawancara dengan Fidelis Magalhaes, Petugas Proyek Mediasi Kelompok Bela Diri, Dili, 31 Januari 2008.

30 Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit/Uni Eropa.

31 GTZ (2007), h. 26.

32 UNPOL (2007).

33 Wawancara dengan petugas UNPOL, Dili, 29 Januari 2008.

## Daftar Pustaka

Alpers, Philip. 2005. *Gun Running in Papua New Guinea: From Arrows to Assault Weapons in the Southern Highlands*, Special Report 5. Geneva: Small Arms Survey.

Democratic Republic of Timor-Leste. Office of the Prime Minister. 2006. 'Media Release.' 1 December.

GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit). 2007. *Securing a Better Future: Martial Arts Groups and Their Potential to Become Part of a Peace Constituency in Timor-Leste*. Dili: GTZ. May.

Haley, Nicole and Robert Muggah. 2006. 'Jumping the Gun: armed violence in Papua New Guinea.' In *Small Arms Survey 2006: Unfinished Business*. Oxford: Oxford University Press

Harrington, Andrew. 2006. 'Ethnicity, Violence, and Property Disputes in Timor-Leste.' *East Timor Law Journal*. <[http://www.easttimorlawjournal.org/ARTICLES/2007/ethnicity\\_violence\\_land\\_property\\_disputes\\_timor\\_lete\\_harrington.html](http://www.easttimorlawjournal.org/ARTICLES/2007/ethnicity_violence_land_property_disputes_timor_lete_harrington.html)>

ICG (International Crisis Group). 2008. *Timor-Leste: Security Sector Reform*. Crisis Group Asia Report no. 143. Dili: ICG. 17 January 2008.

Knezevic, Nevin. 2005. *Timor-Leste: Background Paper on Human Rights, Refugees and Asylum Seekers*. United Nations High Commissioner for Refugees, Protection Information Section. February. <http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4240091d4.pdf>

McWilliam, Andrew. 2005. 'Houses of the Resistance: Structuring Sociality in the New Nation.' *Anthropological Forum*, Vol. 15, No. 1. March, p. 34.

Neupert, Ricardo and Silvino Lopes. 2006. 'The Demographic Component of the Crisis in Timor Leste.' London School of Economics. September.

OHCHR (Office of the High Commissioner for Human Rights). 2006. *Report of the United Nations Independent Special Commission of Inquiry for Timor-Leste*. Geneva: OHCHR. 2 October.

Ostergaard, Lene. 2005. *Timor-Leste Youth Social Analysis Mapping and Youth Institutional Assessment*. Timor Leste: World Bank. June.

Oxfam Timor-Leste with GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) and Timor-Leste Directorate of Land and Property. 2003. *The Customary Use of Natural Resources in Timor Leste*. Timor Leste: Oxfam and GTZ.

Thompson, Edwina and Sinclair Dinnen. 2004. *Gender and Small Arms Violence in Papua New Guinea*. Discussion Paper No. 2004/8. **Canberra**: State, Society and Governance in Melanesia Project, Australian National University.

UNMIT (United Nations Integrated Mission in Timor-Leste). 2008. 'Daily Media Briefing.' 28 August.

UNPOL (United Nations Police). 2007. 'Daily Security Briefing.' 1 February.

Ward, Michael. 2000. 'Fighting for Ples in the City: Young Highlands Men in Port Moresby, Papua New Guinea.' In Sinclair Dinnen and Alison Ley, eds. *Reflections on Violence in Melanesia*. Canberra: Hawkins Press, pp. 231.

## Terbitan TLAVA

### Laporan Singkat

No. 1, Oktober 2008

*Menangani kilat: Uraian historis tentang ketersediaan senjata api kecil dan pengendalian senjata api di Timor Leste*

### Makalah

Parker, Sarah. 2008. 'Commentary on the Draft Arms Law in Timor-Leste.' *East Timor Law Journal*. Available online in English, Tetum, Indonesian, and Portuguese. <<http://www.easttimorlawjournal.org/Articles/Index.html>>

## Ringkasan Proyek TLVA

Penilaian Kekerasan Bersenjata Timor-Leste (TLVA) adalah proyek penelitian independen yang dikelola oleh Austcare dan Penelitian Senjata Api Kecil. Proyek ini melibatkan mitra publik dan mitra non-pemerintah dan dirancang untuk mengidentifikasi dan membahas berbagai perspektif tentang bagaimana dapat mencegah dan mengurangi kekerasan bersenjata yang nyata serta dan yang diduga akan terjadi di Timor Leste. Dengan dukungan dari jaringan mitra, proyek ini berbasis di Dili dan akan menjadi sumber data internasional dan domestik tentang kecenderungan kekerasan. Antara 2008 dan 2010, TLVA akan menjadi pusat untuk penukaran dan pembagian informasi dan analisa dengan fokus spesifik pada:

- Faktor resiko, dampak dan kerugian sosio-ekonomi dari kekerasan bersenjata berhubungan dengan kesehatan penduduk —pada khususnya perempuan, anak dan pemuda, serta pengungsi dalam negeri;
- Dinamika kekerasan bersenjata yang berkaitan dengan kelompok 'resiko tinggi' seperti gerombolan, komunitas khusus di distrik-distrik yang terkena dampak, para pemohon petisi, lembaga negara dan hal-hal yang dapat memicu kekerasan seperti pemilihan; dan
- Ketersediaan dan penyalahgunaan senjata api (misalnya senjata tajam, senjata buatan sendiri, atau yang dibuat oleh 'tukang') sebagai faktor yang mendukung kekerasan bersenjata dan ketidakamanan yang konstan.

Tujuan dari proyek ini adalah memberi opsi untuk merancang kebijakan yang didasarkan bukti sah kepada pemerintah Timor Leste, masyarakat sipil serta mitra-mitranya untuk mengurangi kekerasan bersenjata. Proyek ini menggabungkan berbagai metoda – pengamatan atas kesehatan publik dan penelitian yang didasarkan kelompok fokus dan wawancara – untuk mengidentifikasi prioritas tepat dan strategi praktis. Hasil temuan akan diterbitkan dalam Tetum, Bahasa, Portugis dan Inggris. Laporan Singkat TLVA memberi laporan pada tepat waktu tentang aspek penting dari kekerasan bersenjata di Timor Leste, termasuk ketersediaan dan pendistribusian senjata api kecil dan senjata buatan sendiri di Timor-Leste serta kekerasan yang berkaitan dengan pemilihan.



Proyek ini didukung oleh AusAID.

## Pengucapan Terima Kasih

Desain dan susunan: GoMedia

Keredaksian: Emile LeBrun, Robert Muggah dan James Turton

## Kontak

Untuk informasi lebih lanjut, lihat [www.timor-leste-violence.org](http://www.timor-leste-violence.org) atau menghubungi [info@timor-leste-violence.org](mailto:info@timor-leste-violence.org).

